



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuanga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.491.700.753.944,- (*Dua triliun empat ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.552.769.214,- (*Dua ratus empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.742.293.845,- (*Delapan puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.569.570.676,- (*Sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.504.073.603,- (*Delapan belas milyar lima ratus empat juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.736.831.090,- (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.742.293.845,- (*Delapan puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.047.536.000,- (*Dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.856.400.000,- (*Tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 405.000.000,- (*Empat ratus lima juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 206.826.602,- (*Dua ratus enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.400.000.000,- (*Tiga puluh satu milyar empat ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,- (*Empat ratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.200.000,- (*Lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000,- (*Enam belas milyar rupiah*).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.851.331.243,- (*Sebelas milyar delapan ratus juta lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,- (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.569.570.676,- (*Sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.328.844.750,- (*Empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.738.125.926,- (*Satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.502.600.000,- (*Tiga milyar lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.504.073.603,- (*Delapan belas milyar lima ratus empat juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.005.541.660,- (*Dua belas milyar lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.498.531.942,- (*Enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 133.736.831.090,- (*Seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
  - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 148.400.000,- (*Seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.750.000.000,- (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.750.000.000,- (*Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 119.211.900,- (*Seratus sembilan belas juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*).
- (6) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 121.969.219.190,- (*Seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah*).

## Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.123.765.459.377,- (*Dua triliun seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.994.844.536.000,- (*Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.920.923.377,- (*Seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.382.525.353,- (*Seratus dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah ; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.943.252.000,- (*Empat puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.439.273.353,- (*Tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).

## Pasal 11

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.491.445.106.430,- (*Dua triliun empat ratus sembilan puluh satu milyar Empat ratus empat puluh lima juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.



## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.644.090.175.756,- (*Satu triliun enam ratus empat puluh empat milyar sembilan puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.815.742.511.427,- (*Delapan ratus lima belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.778.178.961.210,- (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.414.247.080,00 (*Dua milyar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.35.855.256.039,- (*Tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.899.200.000,00 (*Dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

## Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.815.742.511.427,- (*Delapan ratus lima belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.435.320.288.948,- (*Empat ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 167.510.135.000,- (*Seratus enam puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 178.068.176.832,- (*Seratus tujuh puluh delapan milyar enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 29.049.514.944,- (*Dua puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.086.203,- (*Seratus tujuh puluh empat juta delapan puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.570.620.000,- (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 435.320.288.948,- (*empat ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.323.327.615.797,- (*Tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.202.455.586,- (*Tiga puluh dua milyar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.605.396.076,- (*Sembilan milyar enam ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.811.786.975,- (*Dua puluh milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.817.733.939,- (*Empat milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.070.334.873,- (*Enam belas milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.844.226.875,- (*Satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.861.288,- (*Lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.295.840.098,- (*Dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 950.496.212,- (*Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.378.541.229,- (*Dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021, yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.022.868.615,- (*Enam puluh satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.61.022.868.615 (*Enam puluh satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.022.868.615 (*Enam puluh satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.022.868.615,- (*Enam puluh satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.022.868.615,- (*Enam puluh satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasional.

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.022.868.615,- (*Enam puluh satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.278.516.129,- (*Enam puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan;
  - Penyertaan modal daerah; dan
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.278.516.129 (*Enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 255.647.514,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 255.647.514,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah*).

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar bn Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
10. Lampiran X Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Alam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

#### Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Desember 2020

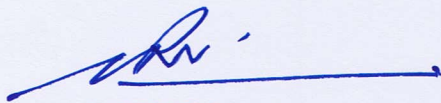
BUPATI MUARA ENIM,



JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 59

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>245.552.769.214</b>
4.1.01	Pajak Daerah	83.742.293.845
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.047.536.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.047.536.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.856.400.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.856.400.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	405.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	162.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kelangkasana	3.600.000
4.1.01.08.09	Pajak Pantai Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	209.400.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	206.826.602
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	121.341.602
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	85.485.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	31.400.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	8.600.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	22.800.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	420.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	420.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	55.200.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	55.200.000
4.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	16.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.851.331.243
4.1.01.15.01	PBBP2	11.851.331.243
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	11.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.569.570.676
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.328.844.750
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	53.000.000



**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	225.120.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	396.330.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.436.160.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.265.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	51.850.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	21.119.750
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	545.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.738.125.926
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.122.498.926
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	78.020.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	14.400.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.200.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	339.007.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.502.600.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.502.600.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.504.073.603
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.005.541.660
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.005.541.660
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.498.531.942
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.498.531.942
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.736.831.090
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Trak Dipisahkan	148.400.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	110.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	38.400.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.750.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.605.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	145.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.750.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.750.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	119.211.900
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.216.269

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	28.849.897
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	12.453.480
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.426.730
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	14.194.649
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	27.589.603
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.470.872
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	121.969.219.190
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	121.969.219.190
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.123.765.459.377</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.994.844.536.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.751.002.764.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	872.755.577.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	626.516.555.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	94.044.758.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	157.685.874.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7.519.190.000
4.2.01.02.01	DID	7.519.190.000
4.2.01.05	Dana Desa	236.322.582.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	236.322.582.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.920.923.377
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	116.420.923.377
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	116.420.923.377
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12.500.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.500.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>122.382.525.353</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	45.943.252.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.810.752.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.810.752.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.132.500.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	22.132.500.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.439.273.353

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	76.439.273.353
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	76.439.273.353
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.491.700.753.944</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
5.1.01	Belanja Pegawai	<b>1.644.090.175.756</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	815.742.511.427
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	435.320.288.948
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	323.327.615.797
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	320.359.321.572
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.968.294.225
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	32.202.455.586
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31.813.105.304
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	389.350.282
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.605.396.076
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.605.396.076
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.811.786.975
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.811.786.975
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.817.733.939
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.570.943.939
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	246.790.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.070.334.873
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.723.790.689
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	346.544.184
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.844.226.875
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.655.459.447
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	188.767.428
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.861.288
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.861.288
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.295.840.098
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.295.840.098
		950.496.212

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	950.496,212
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.378.541,229
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.378.541,229
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	167.510.135,000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	167.510.135,000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	165.881.735,000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.628.400,000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.068.176,832
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.900.508,386
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	89.179,650
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	364.500,781
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	19.025,313
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.845,834
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.546.250,000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	20.750,000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.632,500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	657.520,325
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	594.053,983
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	593.750,000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	645.970,296
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	177.250,000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.609,500
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.574,875
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	102.545,938
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Besar	28.134,688
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.508,125
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.021,553
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	27.250,000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.046,417
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.675,925
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.872,500
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.410,150

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi: Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	195.130.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi: Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	5.625.000
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi: Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	2.315.625
5.1.01.03.03.0001	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	116.815.726.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	116.815.726.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsl) Guru PNSD	936.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsl Guru PNSD	936.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	53.348.054.150
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	53.348.054.150
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.859.418.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	614.170.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.245.248.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	562.500.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	562.500.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.049.514.944
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.032.580.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.032.580.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	120.481.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	120.481.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.841.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.841.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000,000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500,000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500,000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.000,000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.000,000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.809.982,944
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.982,944
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.000,000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000,000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.725.000,000
5.1.01.04.12.001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.100.000,000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.100.000,000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715,000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715,000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.086,203
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.153.915
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.153.915
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359,601
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359,601
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737,000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737,000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344,596
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344,596
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489,256
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489,256
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.570.620,000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120,000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120,000
5.1.01.06.01.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.177.500,000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.177.500,000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.049.689,500
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.049.689,500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	4.049.689,500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.178.961,210
5.1.02.01	Belanja Barang	258.613.137,886
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	258.529.332,508
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	578.283,868
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	403.581,883
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.932.017,363
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	4.503,564
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	67.269.865,040
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-hsi Tabung Pemadam Kebakaran	200.063,510
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	41.088,440
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-hsi Tabung Gas	0
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	181.300,000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	308.410,514
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.599.603,715
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	4.525.299,929
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	45.579,500
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	192,500
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	82.070,860
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.180,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.766,914
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.351,690,545
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.026,100,830
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.517,226,960
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	242.553,200
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	284.293,543
		0

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.308.879.719
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.213.969.684
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	443.984.135
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	108.454.374
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	11.950.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.721.910.670
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.668.342.371
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	5.248.075.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	99.251.247.476
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	6.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.977.955.500
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	689.509.502
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.745.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5.000.000
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	1.351.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.178.682.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	60.513.600
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	56.960.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.319.481.780
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	682.615.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.011.125.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	36.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	335.261.630
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	275.073.487
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	814.520.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	206.189.040
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	70.050.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	369.227.493
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	578.137.369



**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	372.100.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	1.472.500.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	48.900.000
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	83.805.378
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambur-Rambur	67.761.090
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	571.688
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	14.173.700
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.298.900
5.1.02.01.02.003	Belanja Bibit Ternak	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.014	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.015	Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Pengandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Pengandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	300.362.159.997
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	171.245.540.107
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.237.390.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.949.659.977
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	803.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	13.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	322.500.000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	60.500.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.800.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	339.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	32.588.140.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.375.749.200
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	269.275.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.597.500.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, dan Perlindungan Masyarakat	1.991.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	351.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	7.200.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.347.550.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.934.562.290
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.894.140.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	5.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	437.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.632.122.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.858.994.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.228.370.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.436.136.480
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.926.165.343
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.817.680.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	381.600.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perombaan/Pertandingan	366.500.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	321.225.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	481.740.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	259.110.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	314.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	352.750.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	943.250.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	330.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.200.000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.188.400,000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.219.200,000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	733.400,000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Klien/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.187.832,669
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	690.624,220
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.052.797,542
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.920.550,482
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.575.203,000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.287.294,717
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	102.794,900
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.009.737,787
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.026.895,500
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	28.200,000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perkatan	0
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	89.674.938,490
5.1.02.02.02.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.908.681,140
5.1.02.02.02.0003	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	74.745.984,600
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	1.628.155,200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	196.185,600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.820.000,000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.375.931,950
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.888.979,000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.081.240,000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.750,000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21.000,000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.526.692,000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	78.992,000
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	5.000,000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.555.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	1.250.000
5.1.02.02.04.0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percetakan	2.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.026.729.300
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	987.951.600
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	192.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.301.362.700
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.805.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.089.415.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	566.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	41.650.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	41.650.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.812.082.100
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.682.339.100
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	794.475.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.875.545.000
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	900.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	673.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	700.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	3.900.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.268.423.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	18.300.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	474.246.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	385.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	89.246.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.000.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	60.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	60.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	880.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.003.070.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.401.950.000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.376.405,000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.844.360,000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	380.355,000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	194.925,000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	194.925,000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.221.611,332
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.648.281,819
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	35.000,000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.104.776,215
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	522.544,000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.400,000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000,000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	127.730,000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Penguji Kendaraan Bermotor	106.800,000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	76.000,000
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	40.000,000
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	8.000,000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	66.000,000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	83.100,000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	200.000,000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	765.317,604
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	253.860,000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	140.000,000
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	21.600,000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.080.000,000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	20.000,000
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidup-Laboratorium Lingkungan	81.350,000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	440.298,000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	302.706,000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.000,000
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	52.800,000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	150.000,000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.031.281,253
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	4.016.839,053
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.942,200
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	240.000,000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	210.000,000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	375.000,000
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	172.500,000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	1.542.048,260
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	299.640,000
5.1.02.03.04.0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Peltangkap Pengaman Sungai	1.177.468,260
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	64.940,000
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	134.584.169,555
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.584.169,555
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	134.584.169,555
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.306.550,000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.241.550,000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.425.350,000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.000,000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.807.200,000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.000,000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	65.000,000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.091.332,440
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.091.332,440
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.091.332,440
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000,000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.000.000,000
5.1.03.04.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	9.000.000,000
5.1.03.04.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	9.000.000,000
5.1.04	Belanja Subsidi	2.414.247,080
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.414.247,080
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.414.247,080
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.414.247,080
5.1.05	Belanja Hibah	35.855.256,039
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	528.550,000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	528.550,000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	528.550,000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.951.384,031
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.190.065,031
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.190.065,031
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.761.319,000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.781.319,000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	980.000,000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.696.140,000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.696.140,000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.696.140,000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.679.182,008
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.679.182,008
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.679.182,008
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.899.200,000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.899.200,000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu	2.899.200,000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu	2.899.200,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>442.551.811,674</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.600.000,000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	12.600.000,000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.600.000,000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.000.000,000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	600.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.000.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	5.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.952.421.300
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	44.992.215
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	44.992.215
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	44.992.215
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.883.791.995
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.876.531.565
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.096.875.150
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penunjang	2.644.897.500
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.868.915
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	650.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	439.890.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.260.430
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.260.430
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	101.750.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	77.450.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.450.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	71.500.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.500.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	24.300.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	15.800.000
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	8.500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	481.609.541
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	481.609.541
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.484.184
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Kan/Ternak	11.208.329
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	255.500.000
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	45.000.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	3.400.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	1.500.000



**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	156.517,028
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.775.423,142
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.277.222,703
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.833,553
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	35.353,983
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	637.832,918
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	599.202,249
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.130.182,692
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.321.858,786
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	200.510,940
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	118.076,300
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	811.236,423
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	82.238,492
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.151.548,741
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.444.713,010
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	368.017,747
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	211.188,597
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	21.000,000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	135.829,150
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	402.445,886
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	203.554,042
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.800,000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	186.973,542
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.400,000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.380,500
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.866,844
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.866,844
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemanca	195.025,000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	195.025,000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.766,001,955

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.244.002.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	158.967.000
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	2.685.035.000
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	2.400.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.521.999.955
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.521.999.955
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	367.548.198
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	28.003.232
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	508.470
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	24.607.184
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.887.578
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	197.544.966
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	96.980.000
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	100.000.000
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	564.966
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	142.000.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	142.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.355.949.071
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13.813.614.022
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Unit	288.000.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	13.525.614.022
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.542.335.049
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	84.112.617
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	12.339.800
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	399.482.632
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sunur	35.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sunur Pemboran	35.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	18.250.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	800.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	800.000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	17.450.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	17.450.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	229.400.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	229.400.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	92.400.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	5.000.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	132.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	577.480.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	577.480.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	577.480.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	124.306.984
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	124.306.984
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	37.664.043
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	86.642.941
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.788.472.313
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.788.472.313
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.788.472.313
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.255.069.458
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.766.769.458
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.150.793.458
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.436.985.600
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	165.750.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.550.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.304.836.030
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	106.250.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.522.332.360
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.100.000.960
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	106.250.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	212.500.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	72.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.250.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.775.505.000

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	229.432.800
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	7.462.700.708
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.615.976.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.765.906.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	850.070.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	200.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	200.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	200.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.288.300.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.288.300.000
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.298.500.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.989.800.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249.709.777.796
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	153.179.423.233
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	101.691.462.845
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	92.444.007.845
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	9.247.455.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	51.487.960.388
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	51.487.960.388
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	93.772.920.607
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	81.475.766.400
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	71.957.475.658
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	9.518.290.742
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.404.704.207
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.949.103.683
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	455.600.524
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.892.450.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.892.450.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.757.433.956
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.757.433.956
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.757.433.956

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.034.543.120
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	243.972.500
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercepek	243.972.500
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	43.972.500
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	200.000.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	15.621.520
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	15.621.520
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	15.621.520
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	328.610.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	328.610.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	328.610.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.446.339.100
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.446.339.100
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.446.339.100
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>384.803.119.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.325.287.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.374.229.500
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.374.229.500
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.374.229.500
5.4.01.01.03.001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	0
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	951.057.500
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	951.057.500
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	951.057.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	375.477.832.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	375.477.832.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	364.361.671.500
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	364.361.671.500

**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	11.116.160.500
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	11.116.160.500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.491.445.106.430</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>255.647.514</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>61.022.868.615</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.022.868.615
6.1.01.05	Penghematan Belanja	61.022.868.615
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	61.022.868.615
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	61.022.868.615
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>61.022.868.615</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>61.278.516.129</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.129
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.278.516.129
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.129
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.129
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>61.278.516.129</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(255.647.514)</b>

